

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah Keluarga Berencana mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood*. Yaitu satu perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Dan berapa anak yang di cita-citakan yang sesuai kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.

Dalam istilah arab KB juga memiliki arti yang sama dengan *tanzhim al-nasl*, yaitu pengaturan keturunan atau kelahiran. Bukan *tahdid al-nasl*, *birth control*, atau pembatasan kelahiran. Menurut Syaltut, jika program Keluarga Berencana (KB) itu dimaksudkan sebagai usaha pembatasan anak dalam jumlah tertentu, misalnya hanya 3 (tiga) anak untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa terkecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat islam, alam dan hikmah Allah menciptakan manusia agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia Allah untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>1</sup>

Dari program Keluarga Berencana (KB) ini bertujuan untuk memberdayakan wanita dalam hal reproduksi, dimana program ini lebih menekankan kaum wanita untuk menggunakan atau menjalankan program keluarga berencana dibanding kaum laki-laki. Tetapi kaum laki-laki pun bisa

---

<sup>1</sup> Maslani dan Habiallah, 2009, *masail Fiqhiyah Al-Hadisyah*, Bandung: Segs Asry, hlm:

melakukan atau menggunakan alat kontrasepsi, seperti memakai kondom setiap kali melakukan hubungan.

Arti yang luas dari Keluarga Berencana (KB) adalah merencanakan keluarga atau perencanaan keluarga, sehingga persoalannya bukan hanya mengatur besarnya atau jumlah anak atau menjarangkan anak, akan tetapi lebih luar dari itu semua. Yaitu merencanakan dan mengatur segala aspek kehidupan keluarga supaya tercapai suatu keluarga yang bahagia.

Kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengatasi atau menyelesaikan salah satu persoalan keluarga untuk mencapai keluarga bahagia. Maka jelaslah agar usaha Keluarga Berencana (KB) dapat sukses, perlu pula pembinaan dalam pengertian keluarga berencana agar terdapat suatu pengertian yang dapat menjadi pegangan.

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha ke arah pembentukan keluarga bahagia, yakni dengan jalan membangkitkan rasa tanggung jawab kepada orang tua (*parenthood's responsibility*) sesuai dengan konsep Keluarga Berencana bahwa setiap anak yang dilahirkan benar-benar merupakan anak yang dikehendaki (*every child should be a wanted child*). Hal tersebut membantu sekali terjadinya "*ideal mother care*" yakni terlaksananya asuhan ibu yang baik sebagai yang dicita-citakan bagi setiap anak yang merupakan pengemban pewaris dan penerus bangsa dan juga merupaka "*investment for social economic planning*".

Keluarga Berencana berarti merencanakan jarak waktu antar kehamilan menurut kehendak suami-istri dan mengatur jumlah anak yang di cita-citakan,

sehingga akan tersedia lebih banyak waktu untuk memelihara kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu maka pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) mendapat dukungan sepenuhnya dari Sub Bagian Sosial yang mempunyai tujuan yang serupa.<sup>2</sup>

Kata '*azl*' berasal dari kata kerja bahasa Arab yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan atau memisahkan.<sup>3</sup> Secara teknis '*azl*' digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran sperma untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum.<sup>4</sup>

Adanya '*azl*' dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam yang dijadikan sandaran dibolehkannya program Keluarga Berencana (KB).<sup>5</sup> Sebagai metode kontrasepsi yang dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw.<sup>6</sup> Ada juga yang menyebut '*azl*' dalam hubungan suami istri sebagai istilah lain dari KB.<sup>7</sup>

Pandangan NU berkaitan dengan KB bahwa NU mendukung program KB untuk kemaslahatan umat baik secara ekonomi, kesehatan Ibu dan janinnya. Pandangan NU tidak membahas apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk melakukan program KB, hanya jika melakukan program tersebut dengan cara sederhana.

---

<sup>2</sup> Widianti, Ninik, 1987, *Ledakan Penduduk Menjelang Tahun 2000*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm ;157

<sup>3</sup> Edward William Lane, 1956, *Arabic-English Lexion*, Frederick Ungr Publishing Co., New York 1:2036

<sup>4</sup> Ahter Hamed Khan, 1973, *Islami Opinion on Contreaception*, dalam Olivia Schieffelin, ed., *Muslim attitudes Toward Family Planning*, hlm:62

<sup>5</sup> Abdurrahim Umran, 1997, *Islam dan KB*, Penerjemah Muhammad Hasyim, Lentera, Jakarta, hlm:132-168

<sup>6</sup> Abdul Fadl, 1997:57

<sup>7</sup> Abdul Qadir Djaelani, 1997, *Keluarga Sakinah*, penerjemah Sari Meutia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm:189

Sedangkan, Muhammadiyah berpendapat bahwa berdasarkan ayat al-Quran dan Hadis nabi yang menganjurkan agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak, maka mengatur, membatasi, apalagi meniadakan keturunan hukumnya haram.<sup>8</sup> Muhammadiyah hanya membolehkan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran, dengan alasan bahwa terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa ibu dan anak apabila jarak kelahiran terlalu dekat. Sedangkan usaha memperkecil keturunan, tanpa ada kekhawatiran, tidak dapat dibenarkan.<sup>9</sup>

Pernyataan ini dapat dipahami dari penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Masalah Keluarga Berencana sebagai berikut:“ Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak atau merubah organisme yang bersangkutan, seperti: memotong, mengikat dan lain-lain”.<sup>10</sup>

Berdasarkan problematika di atas, penulis melihat adanya perbedaan Pandangan NU dan Pandangan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut dan meneliti penyebab dari timbulnya perbedaan pendapat dari pandangan NU dan pandangan Muhammadiyah. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang dihasilkan keduanya, serta memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

Dengan melihat kenyataan ini telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUKUM KELUARGA BERENCANA (KB)**

---

<sup>8</sup> PP Muhammadiyah, Putusan Tarjih, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.), 309.

<sup>9</sup> PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Membina Keluarga Sejahtera, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, tth.), 45.

<sup>10</sup> PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.),309.

## **MENURUT PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PANDANGAN MUHAMMADIYAH”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, selanjutnya penulis mencoba untuk merumuskan beberapa masalah dan membatasinya pada masalah hukum yang menetapkan tentang keluarga berencana dalam pandangan fatwa. Adapun pertanyaan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum Keluarga Berencana (KB)?
2. Bagaimana dasar hukum fatwa NU dan fatwa Muhammadiyah tentang hukum Keluarga Berencana (KB)?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan dari fatwa NU dan fatwa Muhammadiyah mengenai tentang Keluarga Berencana (KB)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan hukum fatwa NU dan fatwa Muhammadiyah tentang hukum Keluarga Berencana (KB).
2. Untuk mengetahui dasar hukum fatwa NU dan fatwa Muhammadiyah mengenai hukum Keluarga Berencana (KB).
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan fatwa NU dan fatwa Muhammadiyah mengenai Keluarga Berencana (KB).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berasumsi bahwa suatu penelitian dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan individu ataupun bagi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dalam masalah perkawinan dan dalam masalah biologis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun akan menjelaskan tentang “Hukum Keluarga Berencana (KB) menurut Pandangan Nadhlatul Ulama (NU) dan Pandangan Muhammadiyah” sebagai bahan penelitian penyusun telah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berhubungan dengan judul.

##### **2. Kerangka Teori**

Pada dasarnya terjadi suatu perbedaan pendapat diantara para lembaga yang menetapkan hukuman, yang permasalahannya tidak terlepas dari perbedaan metode dan dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum yang dihadapkan kepada mereka. Begitupun dalam masalah hukum Keluarga Berencana (KB) terdapat beberapa perbedaan pendapat, hal ini dikarenakan berbedanya metode penerapan hukumnya.

##### **a. Metode Istibath Hukum Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama**

Metode Ijtihad Hukum Majelis Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'

Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah<sup>11</sup>:

- 1) Metode *Qouly* adalah suatu cara istinbath hukum yang dipergunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.<sup>12</sup>
- 2) Metode *Ilhaqi* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi".<sup>13</sup>
- 3) Metode *Manhajiy* (bermazhab) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.<sup>14</sup>

b. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

---

<sup>11</sup> Sambutan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Jawa Timur, NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)

<sup>12</sup> Ahmad, Zahro. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa il 1926-1999 (Yogyakarta: LKis,

<sup>13</sup> A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan , jilid 2 (jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004), 89

<sup>14</sup> Zahro, Tradisi Intelektual NU, 122

- 1) Pokok *Manhaj* (Metodologi) Tarjih Muhammadiyah *Manhaj* bermakna jalan. Ringkasnya, *Manhaj Tarjih* bermakna metodologi dalam melaksanakan Tarjih. Selain itu, *Manhaj dalam tarjih* juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama adalah alQuran dan Al-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, antara lain Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang Syari'ah tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis saja, melainkan juga dilandasi oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi tajdid, toleran, terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Penjabaran dari prinsip Majelis Tarjih bersifat terbuka dan toleran.
- 2) Metode Pendekatan dan Teknik Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah  
 Dalam Muhammadiyah, Ijtihad hukum adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum shar'iyah yang bersifat zhanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam

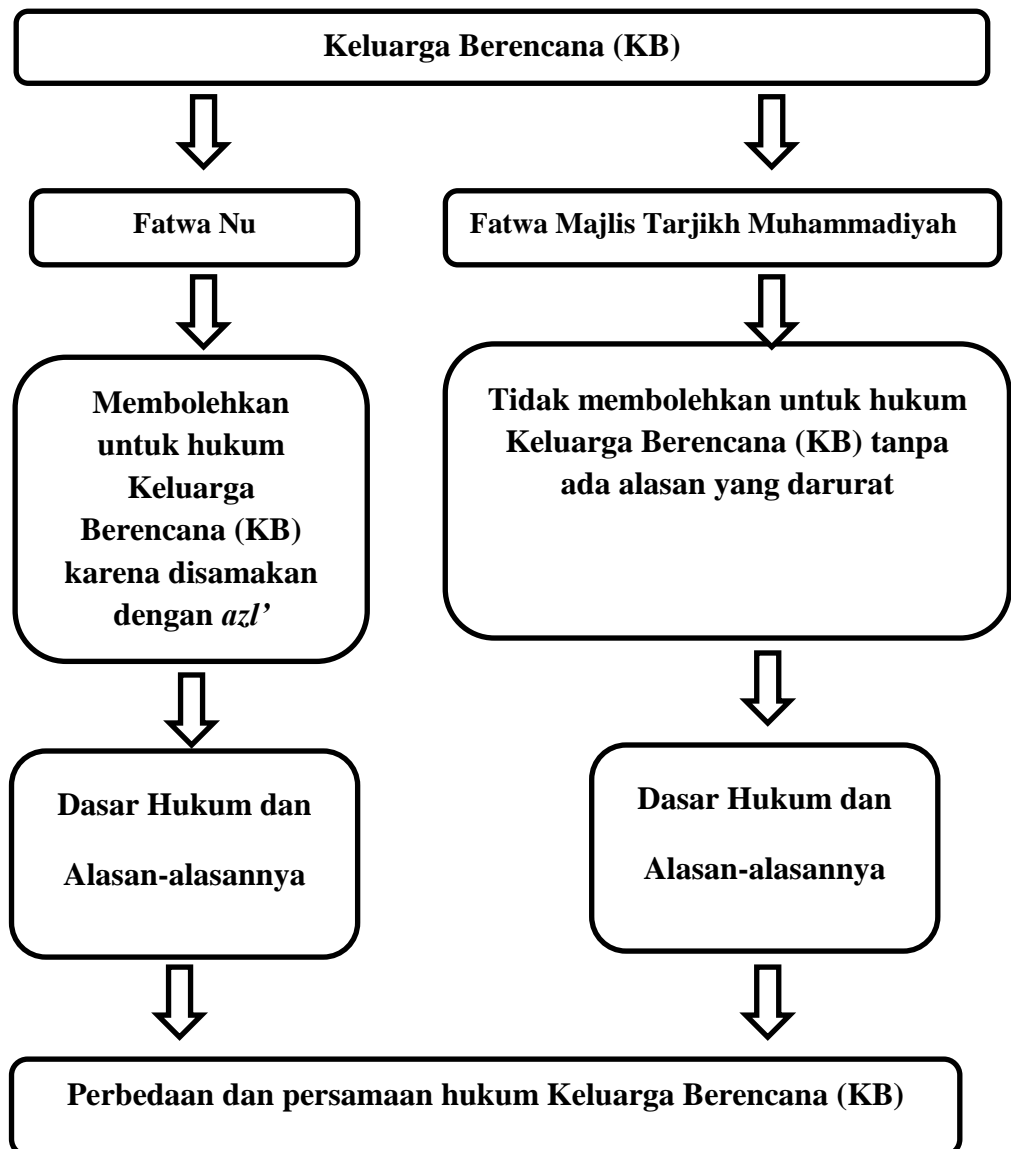


al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam hal ini, Muhammadiyah sejalan dengan faham kelompok *Mukhatti'at* yang menyatakan bahwa ijtihad adalah metode penemuan hukum, bukan sumber hukum dalam Islam<sup>15</sup>.

- 3) Metode yang digunakan dalam Majelis Tarjih adalah:
  - a) *Bayani* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut pula ijtihad qiyasi, yakni usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat nash-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan illah dengan masalah lain yang terdapat nash-nya.
  - b) *Istishlahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Yakni upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum adalah: *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik), *At-tarikhi* (historis) *Al-Susiuluji* (sosiologis), *Al-antrubuluji* (antropologis). Dalam menetapkan hukum, Teknik yang digunakan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah: *Ijma'*, *Qiyas* *Mashalih Mursalah*, *Urf*.

---

<sup>15</sup> , PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, 278



## **F. Langkah-langkah Penelitian**

1. Jenis penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif doktrinal yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan library research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi objek kajian, yang sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karenanya penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian penulisan ini. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Sebagai data primer dan hadits Nabi yang memperkuat penjelasan tersebut, dan buku fatwa.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh, berasal dari pustakaan. Biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

### **3. Teknik pengumpulan data**

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 8911.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.<sup>17</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu, metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan hukum menurut fatwa NU dan fatwa Muhammadiyah mengenai tentang Keluarga Berencana (KB).

---

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 30 .